

Upaya Penanggulangan Sampah Plastik di Kota Banjarmasin

Plastic Waste Management Efforts in Banjarmasin City

Suci Emilia Fitri  ¹, Melati Ayuning Pranasari  ²

^{1,2}Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR PDN BRIN), Jakarta, Indonesia

<https://doi.org/10.46891/kainawa.4.2022.1-10>

Abstrak

Permasalahan sampah plastik tidak saja sebatas botol plastik, sedotan plastik dan wadah makan plastik, namun ada yang lebih harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu kantong plastik. Dari data KLHK jumlah produksi kantong plastik di DKI Jakarta 2000 Ton kantong plastik per tahun dan di daerah Bali 11 % sampah plastik di TPA adalah kantong plastik. Beberapa daerah sudah memberikan komitmen nyata dalam pengurangan sampah plastik salah satunya Kota Banjarmasin yang sudah mengeluarkan Regulasi Berupa Peraturan Walikota. Begitu kompleks dan spesifiknya masalah pengelolaan sampah plastik menjadikan sampah plastik harus mendapat penanganan secara maksimal dan komprehensif. Banyak dari sampah plastik tidak sampai ke tempat pembuangan sampah dan hanya sedikit yang didaur ulang, sehingga banyak sampah kantong plastik tersebut berakhir di saluran air, sungai, sampai akhirnya ke laut. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan seperti: penumpukan kantong plastik di TPA karena kantong plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam, kantong plastik sulit untuk diolah karena kantong plastik yang ada di tempat sampah sudah kotor dan tercampur dengan sampah lainnya. Tujuan dari artikel ini memetakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun *stakeholder* lainnya dalam penanganan sampah plastik di Kota Banjarmasin. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke lapangan dan wawancara mendalam dengan beberapa informan di antaranya (1) Pejabat OPD (Bappeda, Dinas KLHK, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah), (2) Akademisi, (3) Komunitas Peduli Lingkungan. Sedangkan data sekunder berupa dokumen elektronik dan dokumen fisik yang dikumpulkan dari lokasi pengumpulan data. Data juga didapat dengan diskusi kelompok terfokus dengan pemerintah daerah, serta dengan para pakar di bidang pengelolaan sampah. Hasil kajian didapatkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin bersama dengan *stakeholder* terkait di antaranya: (1) Kebijakan daerah berupa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dengan adanya kebijakan tersebut mampu menurunkan jumlah penggunaan plastik di masyarakat sehingga sosialisasi dan upaya preventif lainnya terus digalakkan dengan *stakeholder* lainnya; (2) Kultur budaya masyarakat yang menggunakan bakul purun sebagai pengganti kantong plastik menjadi kekuatan dalam pengurangan sampah plastik di Kota Banjarmasin; (3) Peningkatan kegiatan TPS 3R berbasis masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk; (4) Sosialisasi Pengurangan Sampah, Pengurangan kantong plastik di Ritel/ Toko Modern, Sosialisasi Edukasi ke Sekolah tentang program Adiwiyata, Kegiatan 5000 Bakul Pengganti Kantong Plastik dan Gerakan 1000 Tumbler; (5) Peningkatan pemrosesan akhir dan *composting* di TPA, penangkapan gas metan di TPA dan recovery plastik oleh pemulung.

Kata Kunci

Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Sampah Plastik; Pemerintah Daerah.

Abstract

The problem of plastic waste is not only limited to plastic bottles, plastic straws and plastic food containers, but there is something that must receive serious attention from the Central Government and Regional Governments, namely plastic bags. From KLHK data, the amount of plastic bag production in DKI Jakarta is 2000 tons of plastic bags per year and in Bali 11% of plastic waste in landfills is plastic bags. Several regions have made a real commitment to reducing plastic waste, one of which is Banjarmasin City which has issued a Regulation in the form of a Mayoral Regulation. The complexity and specificity of the problem of plastic waste management means that plastic waste must be handled optimally and comprehensively. Much of the plastic waste does not reach the landfill and only a little is recycled, so that much of the plastic bag waste ends up in water channels, rivers, and finally into the sea. This condition causes several problems such as: the accumulation of plastic bags in landfills because plastic bags take a very long time to decompose in nature, plastic bags are difficult to process because the plastic bags in the trash are dirty and mixed with other waste. The purpose of this article is to map the efforts that can be made by the local government and other stakeholders in handling plastic waste in Banjarmasin City. This article uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was carried out through field observations and in-depth interviews with several informants including (1) OPD Officials (Bappeda, KLHK Service, Regional Financial Management Service), (2) Academics, (3) Environmental Care Community. While secondary data in the form of electronic documents and physical documents collected from data collection locations. Data was also obtained through focus group discussions with local governments, as well as with experts in the field of waste management. The results of the study obtained efforts made by the Banjarmasin City Regional Government together with related stakeholders including: (1) Regional policy in the form of Banjarmasin Mayor Regulation Number 18 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. With this policy, it is able to

reduce the amount of plastic use in the community so that socialization and other preventive efforts continue to be encouraged with other stakeholders; (2) The cultural culture of the community who use purun baskets as a substitute for plastic bags is a strength in reducing plastic waste in Banjarmasin City; (3) Increasing community-based TPS 3R activities Establishment and Development of Unit Waste Banks and Main Waste Banks; (4) Socialization of Waste Reduction, Reduction of Plastic Bags in Retail/Modern Stores, Socialization of Education to Schools about the Adiwiyata program, 5000 Plastic Bag Replacement Baskets Activity and 1000 Tumbler Movement; (5) Increasing final processing and composting at TPA, capturing methane gas at TPA and plastic recovery by scavengers.

Keywords

Policy; Waste Management; Plastic Waste; Local Government.

Penulis korespondensi: Suci Emilia Fitri (suci018@brin.go.id)

Hak cipta: © 2022 Penulis.

Karya ini dilisensikan di bawah lisensi Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional 

Bagaimana mengutip artikel ini: Fitri, S. E., & Pranasari, M. A. (2022). Upaya Penanggulangan Sampah Plastik di Kota Banjarmasin. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.46891/kainawa.4.2022.1-10>

1. Pendahuluan

Secara sederhana pengelolaan sampah diartikan sebagai proses melakukan pengumpulan sampah, pengangkutan atau pemindahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan pendekatan yang bersifat kewilayahan (regional) dan menyeluruh (terintegrasi), pengelolaan sampah dapat dipahami lebih jauh dalam beberapa konsep sebagai berikut: Upaya untuk mengantisipasi pengurangan kuantitas sampah dalam koordinasi dengan sektor ekonomi dan populasi; Memilah, Mengumpulkan, dan Meningkatkan sampah rumah tangga yang direalisasikan dengan sudut pandang ekonomi dan ekologi; Mengurangi tekanan-tekanan negatif yang dihasilkan dari pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir dengan cara optimalisasi pemrosesan akhir sampah.

Meningkatnya penggunaan plastik dalam kehidupan manusia menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan tepat. Dengan itu diperlukannya upaya dari pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang di timbulkan oleh penggunaan kantong plastik, di antaranya: penumpukan kantong plastik di TPA karena kantong plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam, kantong plastik sulit untuk diolah karena kantong plastik yang ada di tempat sampah sudah kotor dan tercampur dengan sampah lainnya.

Plastik merupakan bahan organik yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk, apabila terpapar panas dan tekanan. Plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok, bila dalam bentuk produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, dan lain-lain. Komposisi dan material plastik adalah polymer dan zat aditif lainnya. Polymer tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai ikatan kimia.

Salah satu permasalahan paling menonjol khususnya di wilayah perkotaan yang ada di Indonesia adalah masalah sampah. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas dari manusia maupun dari alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya. Dengan kata lain, semakin bertambahnya jumlah pendudukan atau populasi manusia maka semakin banyak sampah yang dihasilkan dan lahan untuk membuang sampah tersebut tentunya harus semakin diperluas. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Saat ini Indonesia menjadi rangking kedua negara penyumbang sampah plastik di lautan. Hal ini tentunya membuat kita prihatin dan sekaligus menjadi bukti masih rendahnya kesadaran masyarakat dan negara Indonesia dalam penggunaan dan pengelolaan sampah plastik. Kesadaran pengelolaan sampah plastik harus dibangun dan ditingkatkan.

Peningkatan pemanfaatan plastik ini terjadi karena plastik bersifat ringan, praktis, ekonomis dan dapat menggantikan fungsi dari barang-barang lain. Sifat praktis dan ekonomis ini menyebabkan plastik sering dijadikan barang sekali pakai, sehingga semakin banyaknya penggunaan perlengkapan dari bahan plastik tersebut. Hal inilah yang menyebabkan jumlah sampah plastik meningkat terus menerus dan menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan juga mempunyai komitmen dalam pengelolaan sampah yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Permendagri tersebut Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Terkait sampah plastik belum ada regulasi yang spesifik namun sudah ada langkah awal yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berupa Himbauan Menteri Dalam Negeri untuk tidak menggunakan bahan plastik untuk tas, kemasan air minum dan makanan di lingkungan Kemendagri dan BNPP. Selain pemerintah Pusat Pemerintah daerah juga sudah memberikan komitmen nyata dalam

pengurangan sampah plastik ada 14 Provinsi, Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan Regulasi Berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati dan Walikota (Kompas 20 Februari 2018 dan KLHK 2019). Kota Banjarmasin telah mengeluarkan Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Selain Kota Banjarmasin, Kota Bogor juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Ocean Conservancy dan McKinsey Center for Business and Environment (2015) dalam studinya menjelaskan bahwa dua pemicu utama kebocoran sampah plastik adalah sampah yang tidak terpungut dan rendahnya nilai beberapa jenis plastik tertentu. Dalam studi tersebut dikemukakan bahwa 75% kebocoran sampah di daratan berasal dari sampah yang tidak terpungut dan 25% dari sistem resmi pengelolaan sampah padat perkotaan. Selain itu upaya daur ulang tidak cukup untuk dijadikan solusi karena hanya 20% dari sampah plastik tersebut yang dapat di daur ulang.

Permasalahan sampah plastik tidak saja sebatas botol plastik, sedotan plastik dan wadah makan plastik, namun ada yang lebih harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu kantong plastik pembungkus makanan. Dari data KLHK jumlah produksi kantong plastik di DKI Jakarta 2000 ton kantong plastik per tahun dan di daerah Bali 11% sampah plastik di TPA adalah kantong plastik. Begitu kompleks dan spesifiknya masalah pengelolaan sampah plastik menjadikan sampah plastik harus mendapat penanganan secara maksimal dan komprehensif. Banyak dari sampah kantong plastik tidak sampai ke tempat pembuangan sampah dan hanya sedikit yang didaur ulang, sehingga banyak sampah kantong plastik tersebut berakhir di saluran air, sungai, sampai akhirnya ke laut. Kondisi tersebut menimbulkan banyak permasalahan lingkungan karena kantong plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam.

Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M Reza Cordova membeberkan fakta tentang sampah plastik, khususnya mikroplastik. Menurut dia, mikroplastik memang sudah mengancam kerusakan ekosistem laut di Indonesia dan itu terus berlangsung sepanjang tahun tanpa henti. Diperkirakan saat ini mikroplastik yang ada di air laut Indonesia jumlahnya ada di kisaran 30 hingga 960 partikel/liter. Keberadaan mikroplastik di dalam air laut Indonesia, jumlahnya sama dengan jumlah mikroplastik yang ditemukan di air laut Samudera Pasifik dan Laut Mediterania. Namun, lebih rendah dibandingkan di pesisir Tiongkok, Pesisir California, dan Barat Laut Samudera Atlantik.

Permasalahan yang dimaksud di atas timbul disebabkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar sesuai, padahal kebijakan telah mendukung hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan juga telah mendukung kebijakan Pengelolaan Sampah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Lampirannya terdapat urusan konkuren terkait persampahan dengan dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di mana yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Perkembangan pesat jumlah pasar tradisional sebanyak 81 buah yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Pertambahan jumlah pasar tradisional ini seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga terdapat perbedaan

sebaran pasar tradisional di 5 kecamatan tersebut. Sejak di produknya kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2016 sampai sekarang mengalami ketidakefektifan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional. Kondisi ini disebabkan adanya faktor kendala dalam penerapan kebijakan pemerintah kota yang meliputi faktor struktural yang berasal dari lingkungan pemerintah Kota dan kultural masyarakat pasar tradisional (*Abdurahman dkk., 2022*).

Selain itu, *Normajatun dan Haliq (2020)* menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional Kota Banjarmasin dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya: faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala pada sisi masyarakat, yaitu masih rendahnya respons masyarakat, dalam hal masih sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik.

Sejalan dengan uraian di atas, tim pengkaji melakukan kajian ini dengan judul “Upaya Penanggulangan Sampah Plastik di Kota Banjarmasin.”

2. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena dapat menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh stakeholder terkait penanggulangan sampah plastik. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke lapangan dan wawancara mendalam, data sekunder berupa dokumen elektronik dan dokumen fisik yang dikumpulkan dari lokasi pengumpulan data. Pemilihan Kota Banjarmasin karena merupakan daerah yang pertama telah menerbitkan kebijakan sejak tahun 2016 terkait pengelolaan sampah plastik yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Latar belakang Kota Banjarmasin menerbitkan kebijakan tersebut dikarenakan data yang ada menyebutkan bahwa di Kota Banjarmasin telah terjadi peningkatan timbunan sampah dari 532 ton pada tahun 2017 menjadi 600 ton sampah per hari (<https://banjarmasinkota.go.id/?module=page&id=1103>), pada tahun 2018 dan 15 persennya adalah plastik.

Data juga didapat dengan diskusi kelompok terfokus dengan pemerintah setempat, serta dengan para pakar di bidang pengelolaan sampah. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan merangkum dan memilih hal-hal yang dianggap penting serta dicari tema dan polanya. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil observasi kondisi TPA, Kondisi sampah plastik yang ada diTPA dan wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen, foto, maupun gambar. Untuk ditarik kesimpulan.

Secara umum, analisis data dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui teknik diskusi dan data sekunder yang diambil dari media cetak terkait pemberitaan yang berhubungan dengan topik kajian.

Untuk mendapatkan informasi dan data terkait permasalahan kajian, diskusi dilakukan dengan menghadirkan narasumber/pakar yang terdiri dari unsur:

1. Unsur pemerintah daerah (OPD);
2. Unsur Pengusaha terkait; dan
3. Unsur Komunitas dan Akademisi

Teknik analisis data yang digunakan untuk kepentingan pembahasan hasil kajian ini digunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data kualitatif baik dari hasil *focused group discussion*, hasil wawancara maupun data sekunder,

maka peneliti menggunakan alat pengabsahan data hasil kajian dengan menggunakan proses triangulasi, terutama triangulasi sumber data dengan melakukan *coding* data hasil wawancara dan FGD juga mencocokkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berkaitan dengan studi ini adalah studi kebijakan maka diuraikan terlebih dahulu konsepsi terkait kebijakan publik. Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan kebijakan yang memenuhi sifat-sifat kebijakan, sebagaimana sifat tersebut memisahkan antara kebijakan publik dan non publik. Dunn (seperti dikutip dalam [Winarno, 2002](#)) menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Pada umumnya rangkaian tersebut terdiri dari kegiatan penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi atau penilaian sebuah kebijakan publik.

3.1. Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Banjarmasin

Menurut teori D. D. Duncan, masalah lingkungan (khususnya lingkungan urban) mempunyai hubungan interdependensi dengan aspek demografi, organisasi dan teknologi yang dikenal dengan model POET. Sampah merupakan bagian dari masalah lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukannya, teknologi serta organisasi sosial yang berkembang ([Hannigan, John A. 1995](#)).

Selain jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di suatu daerah serta semakin banyak aktivitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukan, semakin banyak energi yang dikonsumsi dan limbah atau sampah yang dihasilkannya pun meningkat. Kualitas sampah yang dihasilkannya juga cenderung semakin banyak sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*). Begitu juga dengan sampah plastik, terutama kantong plastik yang dijadikan wadah pembungkus makanan. Sehingga jumlahnya paling banyak ditemukan di TPA dan juga menjadi penyebab longsor TPA Leuwi Gajah di Bandung yang menyebabkan korban jiwa. Pengelolaan sampah plastik menjadi titik fokus yang harus dilihat akar permasalahannya sehingga dapat mencari alternatif solusi dan strategi yang tepat dalam penanganannya. Pengelolaan sampah plastik di fokuskan pada dua titik yaitu: Penanganan sampah plastik dan Pengurangan sampah.

Pengelolaan sampah plastik belum menggunakan pendekatan Program keberlanjutan, masih mengedepankan proyek tahunan. Hal itu dapat dilihat dari kurangnya komitmen dan kerja sama pemerintah – masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah plastik. Masyarakat masih acuh tak acuh terhadap sampah yang dihasilkannya, Pihak swasta juga masih setengah-setengah dalam mengelola sampah yang dihasilkan oleh produk mereka. Maka dari itu pemerintah dapat menjadi jembatan dan panutan bagi masyarakat.

Penemuan plastik memang seperti buah simalakama di satu pihak plastik sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan di pihak lain, dampak negatif dari penggunaan sampah terus meningkat berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan plastik. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan plastik harus dilakukan dengan sebijak mungkin, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengurangan sampah plastik di antaranya ([Arwini, 2022](#)):

1. Mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Interaksi kegiatan rumah tangga dengan plastik sekali pakai ini sangat tinggi, Sebagai contoh, sekali pergi ke pasar, bisa menghasilkan sampah plastik empat hingga lima lembar.
2. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan *reuse*, *recycle*, dan *recovery*. *Reuse* adalah cara mengurangi timbulan sampah plastik dengan cara pakai ulang

atau penggunaan kembali tanpa perlakuan apa-apa terhadap sampah plastik tersebut.

3. Memberikan penyuluhan-penyuluhan yang bersifat masif dan menyeluruh terutama kepada ibu-ibu rumah tangga sebagai konsumen utama produk plastik agar mampu lebih bijak dalam menggunakan produk plastik dalam kesehariannya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan bank-bank sampah yang mau membeli hasil pemilahan sampah plastik maupun sampah anorganik lain yang telah dipilah di lingkungan rumah tangga oleh masyarakat dengan harga yang layak.

Dalam pelaksanaannya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 telah berhasil dalam implementasinya dan dipatuhi oleh pelaku usaha besar, sedang maupun kecil seperti Toko Modern: Transmart, Duta Mall Banjarmasin, supermarket seperti: Alfamart, Indomaret dan Apotik juga telah berupaya dengan maksimal untuk menjalankan kebijakan tersebut. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai 15% sampah plastik (± 90 ton sampah plastik dengan timbulan sampah 600 ton), Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan sosialisasi dan rencana aksi dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan Walikota antara lain:

1. Pengurangan:

- a) Peningkatan kegiatan TPS 3R berbasis masyarakat
- b) Pembentukan dan Pembinaan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk
- c) Sosialisasi Pengurangan Sampah
- d) Pengurangan kantong plastik di Ritel/Toko Modern
- e) Sosialisasi Edukasi ke Sekolah tentang program Adiwiyata
- f) Kegiatan 5000 Bakul Pengganti Kantong Plastik
- g) Gerakan 1000 Tumbler

2. Penanganan:

- a) Pengumpulan (TPS/Residu TPS/TPST 3R)
- b) Pengangkutan (TPS/Residu TPS/TPST 3R)
- c) Pemrosesan akhir dan komposting di TPA
- d) Penangkapan Gas Metan di TPA
- e) Recovery plastik di TPA oleh pemulung

Selain itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengurangan sampah plastik di antaranya *ecobrick* merupakan salah satu upaya mengurangi produksi sampah plastik, dengan mengolah sampah menjadi benda yang berguna sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekitar (Widiyasari dkk., 2021). Adapun pengolahan sampah dengan *ecobrick* menggunakan media botol plastik yang diisi dengan potongan plastik bekas yang berada dalam kondisi kering dan bersih dengan kepadatan tertentu dan bisa menjadi suatu karya seni yang berguna seperti *furniture* (kursi, meja), ruang tanam, dinding, tempat sampah dan bahkan bisa membuat sebuah bangunan secara utuh (Istirokhatur & Nugraha, 2019).

Kota Banjarmasin sudah melakukan berbagai upaya pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih hal tersebut, mengakibatkan penurunan sampah plastik selama kebijakan pengurangan kantong plastik dilakukan. Data tahun 2017 terdapat 18,51% sampah plastik dan pada tahun 2018 turun sebesar 3% sehingga menjadi 15,51% (data setiap bulan rata-rata 107 kg/bulan dari 3 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) dan 11 Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*). Selain itu mempunyai 3 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) dan 11 Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) dengan melibatkan peran serta masyarakat di lingkungan tempat TPS 3R dan TPST 3R didirikan. Hal ini

membuka peluang usaha baru bagi masyarakat yang ikut dalam pengelolaan sampah di prasarana tersebut.

Sementara itu di tahun 2019 data sampah plastik yang ada di Kota Banjarmasin sebesar 15,1%, hal ini mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 12,77%. Jika dilihat data tahun 2021, komposisi sampah plastik mengalami penurunan walaupun tidak signifikan sebesar 12,1% (Data SIPN, KLHK 2021).

Dengan adanya problem dan data di atas maka masyarakat bersama dengan kelompok pemerhati lingkungan yang tergugah untuk melakukan aksi nyata melihat semakin menurunnya kualitas lingkungan akibat tercemarnya sungai akibat pembuangan sampah oleh sebagian besar masyarakat yang hidup di Daerah Aliran Sungai Martapura ke dalam sungai ke besar Martapura, mahasiswa tersebut membentuk suatu Komunitas Kampung Kita Kota Banjarmasin (Komunitas Kaki Kota Banjarmasin yang diketuai oleh Bapak Syahreza), komunitas ini selama Maret hingga Mei 2018 Kakikota Banjarmasin telah melaksanakan kegiatan Tantangan Rumah Minim Sampah yang diadaptasi dari project LabTanya "Kota Tanpa Sampah" di kampung kalayan kacil khususnya RT 19. Kegiatan ini dimulai dari pendekatan ke warga, diskusi isu-isu terkait permasalahan sampah, melaksanakan tantangan, dan evaluasi berupa kegiatan Syukuran Tanpa Sampah. Selama tantangan warga pelopor mencoba mengurangi sampah rumah tangganya dengan berbagai macam strategi yang dimiliki, Kakikota Banjarmasin telah berhasil mendapatkan pelopor sebanyak 10 orang dengan rata-rata pengurangan sampah 59,78% dan pengurangan tertinggi sebesar 97,53%.

Selain itu telah bahwa telah terjadi pergeseran perilaku dan kebiasaan di dalam masyarakat di mana masyarakat sekarang lebih berpikir praktis dan tidak memikirkan akibat dari pemikiran tersebut, seperti contoh masyarakat lebih memilih plastik sebagai wadah untuk membawa barang belanjaan dibandingkan dengan wadah yang ramah lingkungan seperti jaman dahulu orang tua pergi belanja membawa bakul purun atau lanjung ke pasar dan menjadikan sungai sebagai bak sampah terbuka yang besar, beliau memberi pesan agar penanganan sampah hendaknya dimulai dari rumah tangga masing-masing warga dan memudayakan kembali penggunaan wadah yang ramah lingkungan.

3.2. Upaya Penanggulangan Sampah Plastik

Anthony Giddens melihat lingkungan hidup sebagai salah satu isu utama dan penting dalam sosiologi (Giddens, 2006) yang melihat persoalan ini terkait dengan keberadaan dan dinamika pertumbuhan di negara-negara industri dan proses pembangunan dari negara-negara sedang berkembang. Giddens melihatnya dalam kaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Baginya pembangunan berkelanjutan mengandalkan sumber daya yang didaur ulang dan mampu menekan pencemaran pada tingkat yang minimal. Menurutnya, "Sustainable development means that growth should, at least ideally, be carried on in such a way as to recycle physical resources rather than to deplete them, and to keep levels of pollution to a minimum" (Pembangunan berkelanjutan berarti pertumbuhan harus, setidaknya idealnya, dilakukan sedemikian rupa untuk mendaur ulang sumber daya fisik daripada mengurasnya, dan untuk menjaga tingkat polusi seminimal mungkin).

Dari pengelolaan sampah plastik yang terdapat di Kota Banjarmasin, maka dapat dirumuskan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin di antaranya:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Kebijakan tentang pengurangan sampah plastik mampu menurunkan jumlah penggunaan plastik di masyarakat sehingga sosialisasi dan upaya preventif lainnya terus digalakkan dengan *stakeholder* lainnya;
2. Menanamkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kultur budaya yang menjadi kekuatan

- dalam pengurangan sampah plastik di Kota Banjarmasin di antaranya budaya mengganti plastik dengan bakul purun;
3. Peningkatan kegiatan TPS 3R berbasis masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk;
 4. Sosialisasi Pengurangan Sampah, Pengurangan kantong plastik di Ritel/Toko Modern, Sosialisasi Edukasi ke Sekolah tentang program Adiwiyata, Kegiatan 5000 Bakul Pengganti Kantong Plastik dan Gerakan 1000 Tumbler;
 5. Peningkatan pemrosesan akhir dan *composting* di TPA, penangkapan gas metan di TPA dan *recovery* plastik oleh pemulung.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Pengelolaan sampah plastik masih jauh dari produktivitas hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah sampah plastik yang tidak signifikan dari tahun 2017-2021 yaitu: 18,51% di tahun 2017 ke 12,1% di tahun 2021. Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah cenderung menyinergikan kebijakan sampah plastik dalam pengelolaan arus persampahan (*waste stream*) secara umum. Tidak ada yang salah, namun hal yang menyebabkan kontra produktif adalah pelaksanaan pengelolaan sampah secara umum sendiri masih belum sesuai ekspektasi. Sebenarnya, Paradigma yang dibawa oleh berbagai peraturan perundungan terkait sampah sudah diubah, dari yang dulunya kumpul angkut buang menjadi *reduce, reuse, recycle*. Paradigma ini juga diperkuat ketentuan anti open dumping dalam aktivitas pengelolaan sampah. Faktanya, praktik kumpul angkut buang dan open dumping masih terjadi di daerah-daerah.

4.2. Rekomendasi

Diperlukannya penegasan kebijakan kantong plastik yang berupa Peraturan Kepala Daerah dapat ditingkatkan menjadi Peraturan daerah sehingga dapat dikenakan sanksi jika terjadi pelanggaran. Diperlukannya ketegasan pemerintah kepada retailer, masyarakat dan media untuk lebih peduli lingkungan terutama pada penggunaan kantong plastik. Pemerintah diharapkan agar dapat konsisten dengan kebijakan dan aturan yang telah dibuat mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik, mulai dari pengurangan produksi, penyimpanan, penjualan, distribusi hingga penggunaan plastik. Retailer diharapkan menerapkan aturan dan sistem dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik dan melakukan edukasi kepada konsumen. Diharapkan masyarakat agar dapat menerapkan gaya hidup diet plastik mulai dari rumah dan turut serta melakukan edukasi dan sosialisasi bersama-sama secara komunitas. Diperlukannya peran media diperlukan untuk menyukseskan kebijakan ini dengan menyebarluaskan solusi diet kantong plastik dan alasan untuk melakukannya.

Referensi

- Abdurrahman, H., Suryadi, B., Fitri, M. H., Renita, L., & Alisa, F. N. (2022). Dampak Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada Pasar Tradisional di Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(3), 47–50. <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/755>
- Arwini, N. P. D. (2022). Sampah Plastik dan Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Plastik. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 5(1), 72–82. <https://doi.org/10.47532/jiv.v5i1.412>
- Istirokhatun, T., & Nugraha, W. D. (2019). Pelatihan Pembuatan Ecobricks Sebagai Pengelolaan Sampah Plastik di RT 01 RW 05, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Semarang. *Jurnal Pasopati*, 1(2), 85–90. <https://doi.org/10.14710/pasopati.2019.5549>
- Normajatun, & Haliq, A. (2020). Kebijakan Pemerintah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.31602/as.v5i2.3517>
- Ocean Conservancy, & McKinsey Center for Business and Environment. (2015). *Stemming the Tide: Land-Based Strategies for a Plastic-Free Ocean*. McKinsey & Company and Ocean Conservancy.

- Widiyasari, R., Zulfitria, & Fakhirah, S. (2021). Pemanfaatan Sampah Plastik dengan Metode Ecobrick Sebagai Upaya Mengurangi Limbah Plastik. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/10641>
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.